

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alimuddin. (2014). *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Bunyamin, H. Mahmudin dan Agus Hermanto. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetyo Rijadi. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Ernawati. (2020). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. (1993). *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaini, H. Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Lubis, Hj. Sulaikin dkk. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. 13. Jakarta: Kencana.
- Millah, Saiful dan Asep Saepudin Jahar. (2019). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Amzah.
- Mujahidin, Ahmad. (2014). *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Graha Indonesia.
- Retnowulandari, Wahyuni. (2021). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Shomad, Abd. (2012). *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Suteki dan Galung Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat teori dan praktek)*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek Voor Indonesie*), (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

C. Jurnal

Fadli, (2021). "Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017", *AL-AHKAM: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol, 1 Nomor 1. <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/issue/view/24>

Maulidi, Anas Makruf, (2022). “*Pelaksanaan Putusan Cerai Talak Atas Nafkah Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*” (*Studi Putusan Nomor 5410/Pdt. G/2019/PA. Kab. Mlg*), Universitas Islam Malang, *DINAMIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 28 Nomor 3. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14609/0>

Rusli, Tara Fathin, (2020). “*Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kolaka*”, Universitas Muhammadiyah Makassar. <https://digilib.unismuh.ac.id/dokumen/detail/19423/>

D. Internet

<https://analisahukum.com/hak-istri-saat-digugat-cerai-talak-suami/> diakses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 11.15 WIB.